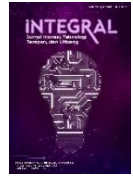


Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 2 No 1 (2023), Halaman: 11-21

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo

Yusrina Rachmawati¹ ✉

Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, Indonesia⁽¹⁾

✉ yusrina.rachmawati.yr@gmail.com

Kata kunci:
*Permukiman Kumuh,
Kawasan Kumuh*

Abstrak

Kecamatan Kutoarjo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo yang masuk ke dalam SK Kumuh Bupati Purworejo. Kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo berada di Kelurahan Kutoarjo dengan luasan total 48,92 Ha. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode SWOT dan dilanjutkan dengan pengkajian alternatif menggunakan Teknik Bardach. Berdasarkan hasil analisis diperoleh strategi yang digunakan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Kutoarjo yaitu dengan Penanganan fisik kawasan, melalui peningkatan jumlah rumah layak huni serta peningkatan akses terhadap infrastruktur. Strategi tersebut kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan serta dilakukan monitoring serta evaluasi guna mengetahui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Keywords:
Slums, Slum Area

Abstract

Kutoarjo District is one of the sub-districts in Purworejo Regency which is included in the slum area of the Purworejo Regent. Slum area in Kutoarjo District is in the Kutoarjo Village that has total area 48,92 Ha. The research method used SWOT and Bardach Technique. Based on the results of the analysis, strategy used is obtained by means of physical handling of the area, through increasing the number of livable houses and increasing access to infrastructure. Then translated into programs and activities, monitoring and evaluation is carried out to determine the realization of implementation of the planned programs and activities.

DOI: [10.57122/integral.v2i1.18](https://doi.org/10.57122/integral.v2i1.18)



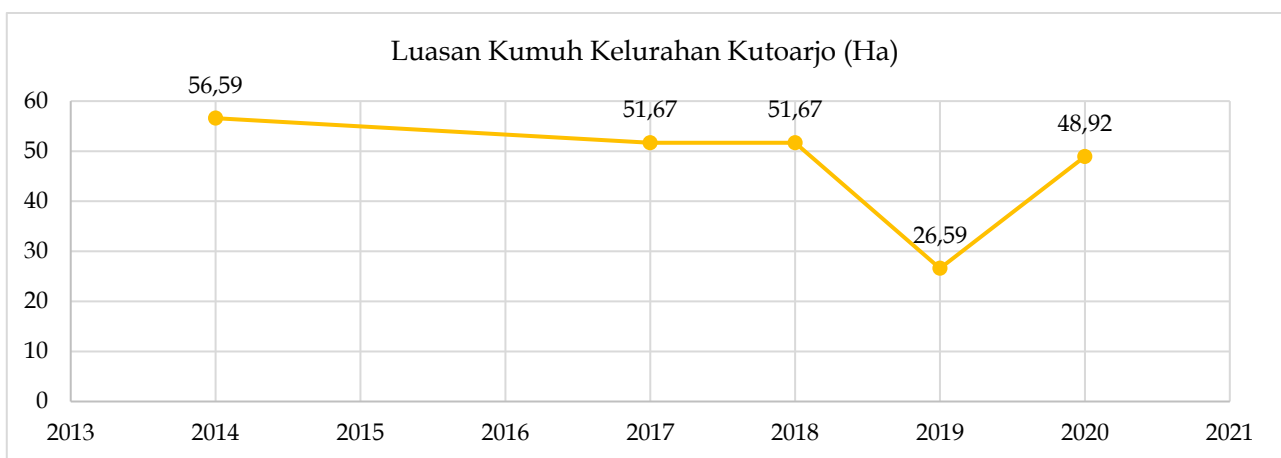
1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Masalah kawasan kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan. Tingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan yang menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan (terutama golongan MBR) untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di lahan-lahan ilegal yang mendekati pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh. Di sisi lain, belum terpenuhinya standart pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada beberapa kawasan permukiman yang berada di lahan legal pun pada akhirnya bermuara pada terciptanya permukiman kumuh di Kawasan perkotaan. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru.

Suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan kumuh berdasarkan penilaian pada 7 (tujuh) kriteria berdasarkan [Permen PUPR No. 14 Tahun 2018](#) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah Kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan, dan Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran.

Kecamatan Kutoarjo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo yang masuk ke dalam [SK Kumuh Bupati Purworejo Tahun 2020 No. 160.18/526/2020](#). Kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo berada di Kelurahan Kutoarjo dengan luasan total 48,92 Ha yang tersebar di 20 RT dan 5 RW. Pada tahun 2019 luasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo seluas 26,59 Ha. Terdapat penambahan sebesar 22,33 Ha dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya upaya penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo khususnya Kecamatan Kutoarjo.



Gambar 1. Luasan Kumuh Kelurahan Kutoarjo (Ha)
Sumber: Dokumen RP2KPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Sedangkan kondisi tujuh kriteria kumuh berdasarkan [Permen PUPR No. 14 Tahun 2018](#) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kutoarjo dapat dilihat pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Profil Kawasan Kumuh Kutoarjo
Profil Kawasan Kumuh Kutoarjo

Bangunan	Jalan Lingkungan	Air Minum	Drainase	Air Limbah	Persampahan	Proteksi Kebakaran
- Jumlah Bangunan : 1.250 Unit - Jumlah RTLH : 47 Unit 280 Unit bangunan tak teratur 25,6 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan	- Panjang Jalan baru yang dibutuhkan: 662 meter 5.537,5 meter jaringan jalan tidak sesuai persyaratan teknis.	597 KK tidak terakses air minum berkualitas/aman 193 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	- Kawasan BEBAS Genangan/Banjir: 46,76 Ha - Luas kawasan yang terkena genangan: 2,16 Ha - Ketidaktersediaan drainase : 4.173,8 m - Saluran drainase rusak : 3.312,2 m	15 KK tidak terakses sistem air limbah standar teknis 27 KK dengan sapsras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	- Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA: 508 unit rumah tangga 826 KK tidak dilengkapi sapsras sampah sesuai persyaratan teknis	260 Unit bangunan hunian tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran 972 Unit bangunan hunian tidak terlayani sarana

Profil Kawasan Kumuh Kutoarjo						
Bangunan	Jalan Lingkungan	Air Minum	Drainase	Air Limbah	Persampahan	Proteksi Kebakaran
47 Unit bangunan tak sesuai persyaratan teknis					522 KK dengan sapras pengolahan sampah tidak terpelihara	proteksi kebakaran

Sumber: Dokumen RP2KPKP Kabupaten Purworejo, 2021

Salah satu permasalahan dalam penanganan kumuh di Kabupaten Purworejo adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk meningkatkan kualitas hunian tempat tinggalnya, sementara anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak bisa sepenuhnya dialokasikan dalam penanganan kawasan kumuh. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Purworejo yang tinggal di lokasi kumuh menyebabkan permasalahan kumuh semakin sulit untuk ditangani, sehingga justru mengalami peningkatan pada tahun 2020 terlebih saat pandemi Covid-19 mewabah.

Tingginya luasan kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kawasan permukiman merupakan kawasan rawan banjir, kepadatan bangunan pada kawasan permukiman cenderung tinggi dan didominasi oleh bangunan yang tidak teratur, banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Saluran drainase tidak berfungsi dengan optimal, kondisi jalan lingkungan tidak memadai, serta kondisi sarana prasarana jaringan air limbah (sanitasi) kurang memadai. Secara garis besar, permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik berhubungan dengan kondisi fisik sarana dan prasarana permukiman, sedangkan aspek non fisik berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Luas kawasan kumuh yang tinggi berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator penurunan kualitas hidup masyarakat adalah rendahnya tingkat kesehatan di lingkungan kawasan kumuh tersebut.

Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi dalam “Menurunkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo dari 48,92 Ha di tahun 2020 menjadi 32,15 Ha di tahun 2023”. Diharapkan dari kajian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan penanganan Kawasan kumuh bagi pemerintah maupun seluruh stakeholder yang terkait.

1.2. Tinjauan Pustaka

Permukiman kumuh pada umumnya terjadi di kawasan perkotaan karena keterbatasan oleh keahlian tenaga kerja mengakibatkan masyarakat tersebut menempati lokasi yang pada umumnya ilegal dan mendirikan bangunan dengan sangat berdekatan sehingga menimbulkan kawasan semrawut, kawasan kumuh dibagi menjadi dua yaitu *slum area* dan kawasan *squatter*. Kawasan kumuh atau *slum area* adalah suatu wilayah permukiman dengan kondisi bangunan dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tergolong kotor tetapi wilayah tersebut umunya status kepemilikan lahannya jelas tetapi kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan tidak (Reading Hugo F, 1986).

Kawasan *squatter* yaitu merupakan suatu sekumpulan lahan yang dihuni oleh permukiman – permukiman liar, dimana kondisi bangunan ada yang baik dan buruk tetapi permasalahannya terdapat pada status lahan yang illegal. (Utomo Is Hadri, 2000). Daerah *squatter* jika diartikan dalam

kamus sosiologi adalah kondisi dimana seseorang dikatakan illegal dalam bertempat tinggal pada suatu tempat (Soekanto Soerjono, 1985). Sedangkan dalam kamus ilmu-ilmu sosial daerah *squatter* diartikan sebagai seseorang yang menempati tanah-tanah tanpa ijin resmi (Reading Hugo F, 1986). Wilayah *squatter* adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat dimana pada umumnya jenis bangunan semi permanen dan dibangun di lahan yang illegal karena merupakan lahan yang tidak jelas status kepemilikan lahan, sebagian besar adalah lahan negara sebagai kawasan lindung.

Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik dari berbagai sector seperti 1). Permukiman padat penduduk dimana umumnya berada di perkotaan karena diakibatkan urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota, 2). Tingkat mata pencaharian yang tidak tetap mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah, 3). Kondisi bangunan tergolong semi permanen karena ketidakmampuan untuk membeli bahan bangunan yang kokoh, 4). Kondisi kebersihan dan sanitasi rendah, 5). Pelayanan sarana prasarana lingkungan tidak memadai, 6). Kondisi persil antar satu bangunan dengan bangunan lainnya tidak tertata dengan baik, tergolong semrawut, 7). Umumnya dihuni oleh kondisi sosial ekonomi menengah kebawah, dan 8). Status kepemilikan tanah yang tidak jelas dimana sebagian besar adalah tanah milik negara.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Studi Literatur

Metode ini dilakukan melalui pengkajian teori maupun pengolahan terhadap data sekunder.

2. Analisis Pohon Masalah

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dengan memetakan akar masalah, masalah, masalah inti, serta dampak yang ditimbulkan apabila masalah tidak diselesaikan.

3. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*)

Metode ini digunakan untuk menilai kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), serta ancaman (T). Dengan metode ini diperoleh beberapa strategi untuk mengatasi masalah.

4. Metode Bardach

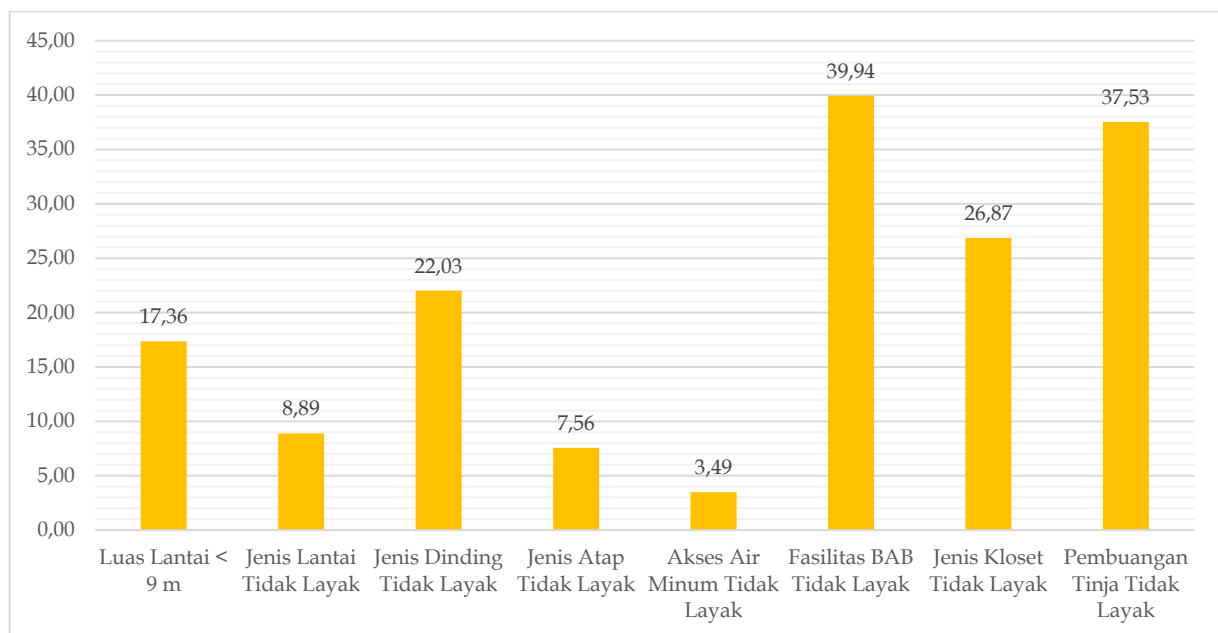
Metode ini digunakan untuk menilai/ skoring beberapa strategi sehingga muncul indeks untuk mendapatkan strategi prioritas. Metode Bardach mendasarkan pada empat aspek dasar penilaian, yakni aspek teknis, ekonomi, politik, dan administratif.

- a. Aspek teknis (*technical feasibility*), dengan mengukur tingkat efektivitas dan adekuasi suatu kegiatan.
- b. Aspek ekonomi (*economic and financial possibility*), dengan mengukur efisiensi ekonomi, efektivitas biaya, *profitability*, dan *change in net-worth* suatu kegiatan.
- c. Aspek politik (*political viability*), dengan mengukur tingkat *acceptability, appropriateness, responsiveness, equity*, dan *legal* suatu kegiatan.
- d. Aspek administratif (*administrative operability*), dengan mengukur tingkat *authority, institutional commitment, capability*, dan *organizational support* suatu kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu permasalahan dalam penanganan kumuh di Kabupaten Purworejo adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk meningkatkan kualitas hunian tempat tinggalnya, sementara anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak bisa sepenuhnya dialokasikan dalam penanganan kawasan kumuh. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Purworejo yang tinggal di lokasi kumuh menyebabkan permasalahan kumuh semakin sulit untuk ditangani, sehingga justru mengalami peningkatan pada tahun 2020 terlebih saat pandemi Covid-19 mewabah. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa RTLH di kawasan kumuh memiliki kriteria sebagai berikut, 1). Luas lantai bangunan kurang dari 9 m² per jiwa, 2). Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester, 3). Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester, 4). Jenis atap bangunan tempat tinggal terbuat dari ijuk/ jerami/ seng/ asbes/ kayu berkualitas rendah, 5). Akses air minum berasal dari air hujan, air sungai, dan mata air tidak terlindungi, 6). Tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB) atau dilakukan secara komunal, 7). Tidak memiliki kloset, atau kloset berbentuk plengsengan/cublukan, dan 8). Tidak memiliki tangki septic/ SPAL sehingga pembuangan tinja dilakukan dengan langsung menggali tanah atau dibuang langsung di kolam/ sungai/ danau.

Sedangkan kondisi RTLH di Kabupaten Purworejo berdasarkan kriteria di atas dapat digambarkan pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Capaian Persentase Kriteria Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Purworejo

Sumber: [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial \(DTKS\) Kabupaten Purworejo, 2021](#)

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada [Gambar 2](#) menjelaskan permasalahan yang ada di Kawasan Kumuh Kutoarjo dapat dirumuskan pada Analisis Pohon Masalah pada [Gambar 3](#).



Gambar 3. Analisis Pohon Masalah Kawasan Kumuh di Kelurahan Kutoarjo

Sumber: Penulis, 2022

Tingginya luasan kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kawasan permukiman merupakan kawasan rawan banjir, kepadatan bangunan pada kawasan permukiman cenderung tinggi dan didominasi oleh bangunan yang tidak teratur, banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Saluran drainase tidak berfungsi dengan optimal, kondisi jalan lingkungan tidak memadai, serta kondisi sarana prasarana jaringan air limbah (sanitasi) kurang memadai. Secara garis besar, permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik berhubungan dengan kondisi fisik sarana dan prasarana permukiman, sedangkan aspek non fisik berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Luas kawasan kumuh yang tinggi berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator penurunan kualitas hidup masyarakat adalah rendahnya tingkat kesehatan di lingkungan kawasan kumuh tersebut.

Berdasarkan analisis permasalahan pada [Gambar 3](#), maka tujuan dari perencanaan ini adalah “Menurunkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo dari 48,92 Ha di tahun 2020 menjadi 32,15 Ha di tahun 2023”. Tujuan perencanaan tersebut akan direalisasikan melalui alternatif strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan supaya lebih terarah dalam pelaksanaannya.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, diperlukan rumusan strategi untuk mengarahkan program dan kegiatan sehingga luas kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo dapat berkurang sesuai target. Perumusan strategi dengan sudut pandang Pemerintah Kabupaten Purworejo dilaksanakan menggunakan teknik analisis SWOT. Teknik analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threat*).

Tabel 2. Matrik Persilangan SWOT

Internal Eksternal	Strength	Weakness
	1. Adanya komitmen Pemkab Purworejo dalam menangani kawasan kumuh 2. Adanya program penanganan kumuh berbasis masyarakat yaitu KOTAKU 3. Adanya kolaborasi multi dinas dan swasta dalam penanganan kawasan kumuh	1. Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan rawan banjir 2. Kepadatan bangunan tinggi dan ketidak teraturan bangunan 3. Adanya RTLH 4. Saluran drainase tidak berfungsi optimal 5. Jalan lingkungan tidak memadai 6. Sarpras sanitasi dan persampahan kurang memadai
Opportunity	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Adanya program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah provinsi dan pusat yang berkolaborasi dengan daerah seperti Program KOTAKU, Pamsimas, BPS, DAK SLBM serta swasta (CSR) 2. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah provinsi dan pusat	1. S1-S2-S3-O1: Meningkatkan kolaborasi dengan pusat dan provinsi dalam penanganan kawasan kumuh 2. S2-S3-O2: Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh	1. W1-W4-O1-O2: Penanganan banjir melalui rehabilitasi saluran drainase berbasis padat karya. Rehabilitasi drainase dapat dilakukan dengan normalisasi dan perbaikan saluran drainase 2. W2-O1: Pembatasan jumlah bangunan yang akan dibangun 3. W3-O1-O2: Pembangunan RTLH melalui program BPS serta swasta (CSR) 4. W5-O1-O2: Rehabilitasi jalan lingkungan dapat dilakukan dengan pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan melalui sistem padat karya 5. W6-O1-O2: Pembangunan sarpras sanitasi dan persampahan baik individual maupun komunal melalui program DAK SLBM serta swasta (CSR)
Threat	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Rendahnya kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat 2. Budaya / kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan	1. S1-S3-T1: Meningkatkan sinergi antar dinas dan swasta dalam peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat 2. S2-T2: Meningkatkan keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan	1. W1-T2: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak membuang sampah di saluran drainase karena dapat menyebabkan saluran drainase tersumbat dan banjir 2. W2-W3-T1: Meningkatkan pendampingan serta pemberian dana stimulan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat dapat tinggal di rumah layak huni dan di lingkungan dengan kepadatan rendah 3. W4-W5-W6-T1:

		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarpras permukiman seperti jalan lingkungan, saluran drainase, sarpras sanitasi serta persampahan
--	--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan [Tabel 2](#) hasil persilangan unsur-unsur Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Ancaman (*Threat*) dalam upaya penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo, telah ditentukan 12 alternatif solusi. Langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi utama dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo berdasarkan alternatif solusi yang telah terbentuk sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. Analisis Alternatif Strategi

Keterangan	Alternatif Solusi	Strategi Utama
S-O (1)	Meningkatkan kolaborasi dengan pusat dan provinsi dalam penanganan kawasan kumuh	<u>Strategi Utama A</u> Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni.
S-O (2)	Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh	
S-T (1)	Meningkatkan sinergi antar dinas dan swasta dalam peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat	
S-T (2)	Meningkatkan keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan	
W-T (1)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak membuang sampah di saluran drainase karena dapat menyebabkan saluran drainase tersumbat dan banjir	
W-T (2)	Meningkatkan pendampingan serta pemberian dana stimulan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat dapat tinggal di rumah layak huni dan di lingkungan dengan kepadatan rendah	
W-T (3)	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarpras permukiman seperti jalan lingkungan, saluran drainase, sarpras sanitasi serta persampahan	
W-O (1)	Penanganan banjir melalui rehabilitasi saluran drainase berbasis padat karya. Rehabilitasi drainase dapat dilakukan dengan normalisasi dan perbaikan saluran drainase	<u>Strategi Utama B</u> Penanganan fisik kawasan, yaitu dengan meningkatkan jumlah rumah layak huni serta
W-O (2)	Pembatasan jumlah bangunan yang akan dibangun	

Keterangan	Alternatif Solusi	Strategi Utama
W-O (3)	Pembangunan RTLH melalui program BSPS serta swasta (CSR)	meningkatkan akses terhadap infrastruktur.
W-O (4)	Rehabilitasi jalan lingkungan dapat dilakukan dengan pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan melalui sistem padat karya	
W-O (5)	Pembangunan sarpras sanitasi dan persampahan baik individual maupun komunal melalui program DAK SLBM serta swasta (CSR)	

Sumber: Penulis, 2022

Dari 5 (lima) alternatif solusi sebagaimana dijabarkan dalam [Tabel 3](#), disimpulkan terdapat 3 (tiga) alternatif strategi utama dalam rangka mencapai tujuan menurunkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo yakni:

- 1) Strategi Utama A: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni.

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dilakukan, salah satu penyebab permukiman kumuh adalah karena rendahnya perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari adanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Oleh karena itu, salah satu fokus dalam strategi ini adalah meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat sehingga lebih berdaya dalam peningkatan kualitas hidup mereka. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdampak pada tingginya pengangguran menyebabkan rendahnya pengeluaran perkapita sehingga masyarakat tidak mampu menjangkau hunian yang layak.

Masyarakat dituntut untuk dapat secara mandiri dan berdaya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungannya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Proses pemberdayaan ini dapat dilaksanakan oleh Bappedalitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) melalui pelaksanaan program pendampingan dan memaksimalkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal masyarakat dengan melalui konsep sustainable livelihood (kehidupan dan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan) dapat dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DINKUKMP) dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta untuk membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat juga dapat dilakukan salah satunya dengan pengembangan kelembagaan dan kegiatan usaha Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada masing-masing desa/kelurahan. Proses pemberdayaan ini dilaksanakan dengan berkelompok pada setiap desa sehingga modal sosial yang telah dimiliki dapat dikembangkan secara lebih maksimal. Masyarakat yang terbentuk dalam satu kelompok dapat saling memotivasi serta saling berbagi ilmu dan keterampilan untuk kemajuan bersama. Berbagai jenis pelatihan dapat diberikan kepada masyarakat sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vocational seperti pengembangan produksi berbasis sumber daya alam mengingat Kabupaten Purworejo memiliki sektor unggulan pada pertanian maupun pengembangan produksi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian. Selain itu peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan

pengembangan kegiatan fisik/infrastruktur lewat padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian sekaligus membangun infrastruktur untuk mempermudah aktivitas masyarakat.

- 2) Strategi Utama B: Penanganan fisik kawasan, yaitu dengan meningkatkan jumlah rumah layak huni serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur.

Pengembangan rumah yang layak huni harus dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh persyaratan rumah layak dapat terpenuhi. Strategi ini mencakup perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penyusunan rencana yang disertai dengan kolaborasi yang baik akan dapat mengarahkan ketercapaian implementasi pembangunan/renovasi rumah layak huni.

Di samping itu, strategi ini juga akan mencakup optimalisasi pendataan RTLH secara lengkap di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Pendataan dilakukan dengan menyiapkan instrumen yang memenuhi indikator-indikator dalam penanganan RTLH yang dapat dikolaborasikan dengan Perguruan Tinggi dalam pengkajian dan pelaksanaannya. Kebutuhan data yang diperlukan antara lain seperti kondisi rumah yang meliputi konstruksi atap, lantai, dinding, serta luas lantai yang dimiliki. Sumber air minum yang dikonsumsi sehari-hari serta sistem pengolahan limbah rumah tangga yang digunakan juga didata secara lengkap dengan validitas terjamin. Status lahan dan bangunan juga perlu dicatat karena hal ini akan berpengaruh pada metode penanganan RTLH yang digunakan berupa renovasi atau relokasi. RTLH dengan status lahan dan bangunan legal yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Sertipikat Tanah, dapat ditingkatkan kualitasnya dengan renovasi sesuai dengan jenis kerusakan yang dimiliki. Sedangkan bagi rumah tangga yang menempati RTLH di lokasi ilegal, dapat direlokasi ke Rusunawa atau Perumahan Terjangkau MBR dengan sebelumnya diberikan sosialisasi untuk meminimalkan konflik.

Selain rumah layak huni, infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air minum, sarana prasarana air limbah, sarana prasarana persampahan, serta proteksi kebakaran juga perlu diperhatikan karena aspek-aspek tersebut termasuk ke dalam aspek kumuh berdasarkan [Permen PUPR No. 14 Tahun 2018](#) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Strategi yang dilakukan di tiap aspek infrastruktur dapat berbeda tergantung pada kondisi infrastruktur tersebut.

Selanjutnya, dilakukan penelaahan alternatif dengan metode Bardach. Terdapat empat kriteria, yakni *technical feasibility*, *economic and financial possibility*, *administrative*, dan *political viability*. Bobot diberikan pada tiap kriteria, didapatkan dari hasil FGD di Kabupaten Purworejo. Dari pembobotan tersebut, dapat diukur indeks masing-masing kriteria sehingga didapatkan total indeks pada strategi utama 1 (kesatu) dan strategi utama 2 (kedua). Pengkajian dua strategi utama dengan metode Bardach dapat diamati pada [Tabel 4](#).

Tabel 4. Pengkajian Strategi Utama dengan Metode Bardach

Kriteria		Ranking		Bobot	Indeks	
		Strategi A	Strategi B		Strategi A	Strategi B
<i>Technical Feasibility</i>	Efektivitas	1	3	30	30	90
	Adekuasi	1	3		30	90
<i>Economic and Financial Possibility</i>	Efisiensi ekonomi	3	2	30	90	60
	Efektivitas biaya	2	2		60	60
	<i>Profitability</i>	1	3		30	90

Kriteria		Ranking		Bobot	Indeks	
		Strategi A	Strategi B		Strategi A	Strategi B
	<i>Change in net-worth</i>	3	3		90	90
<i>Political Viability</i>	<i>Authority</i>	2	3	20	40	60
	<i>Institutional commitment</i>	1	1		20	20
	<i>Capability</i>	2	3		40	60
	<i>Organizational support</i>	2	3		40	60
<i>Administrative operability</i>	<i>Acceptability</i>	3	3	20	60	60
	<i>Appropriateness</i>	2	3		40	60
	<i>Responsiveness</i>	1	3		20	60
	<i>Equity</i>	2	3		40	60
	<i>Legal</i>	2	2		40	40
Total		28	40	100	670	960

Sumber: Penulis, 2022

Dari hasil analisis menggunakan Teknik Bardach, strategi dengan nilai terbesar adalah Strategi B yaitu **Penanganan fisik kawasan, yaitu dengan meningkatkan jumlah rumah layak huni serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur.**

4. KESIMPULAN

Upaya menurunkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo dilakukan melalui strategi Penanganan fisik kawasan, yaitu dengan meningkatkan jumlah rumah layak huni serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur. Strategi ini diimplementasikan melalui tujuh program yaitu Rehabilitasi Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Pembangunan/Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan; Peningkatan Sarana Prasarana Saluran Drainase Lingkungan; Peningkatan Sarana Prasarana Air Minum; Penanganan Air Limbah; Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan; serta Penyediaan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Dengan dilaksanakannya ketujuh program tersebut diharapkan luas kawasan kumuh di Kelurahan Kutoarjo dapat menurun menjadi 32,15 Ha di tahun 2023.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Kabupaten Purworejo. (2020). *SK Kumuh Bupati Purworejo Tahun 2020 No. 160.18/526/2020*. Purworejo: Bupati Purworejo.
- Kabupaten Purworejo. (2021). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Purworejo*. Purworejo: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- Kabupaten Purworejo. (2021). *Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP) Kabupaten Purworejo*. Purworejo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Reading, Hugo F. (1986). *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Utomo, Is Hadri. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Implementasi Proyek Peremajaan Permukiman Kumuh di Bantaran*. Surakarta: FISIP-Universitas Sebelas Maret.